



## **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BERPENDEKATAN KLARIFIKASI NILAI DI SEKOLAH DASAR**

**Oleh**

**AI Darmono**

(Dosen IAI Ngawi)

**I Gede Astawan**

(Dosen Undiksha)

### **ABSTRAK**

*Corruption seems to have been entrenched among the people of Indonesia. Events of corruption almost every day is preached in mass media. Although all efforts to eradicate continue to be done but the case of corruption is still not reduced. Corruptive behavior is actually bad impact not only economic system but also the system of democracy, politics, law, government and so forth. Based on the adverse impacts, corruption should continue to improve. Efforts to eradicate corruption are not only through the provision of sanctions and punishment for the perpetrators but should be carried out early preventive measures through anti-corruption education in Elementary School. One alternative of anti-corruption education in Primary School is through Value Clarification approach. The approach is an approach that places emphasis on helping students learn their own feelings and actions, to enhance their own values. This approach is considered effective for education in a democratic world, such as Indonesia.*

### **A. PENDAHULUAN**

Di dunia internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, citra buruk akibat korupsi menimbulkan kerugian. Kesan buruk ini menyebabkan rasa rendah diri saat berhadapan dengan orang lain dan kehilangan kepercayaan pihak lain. Ketidakpercayaan pelaku bisnis dunia pada birokrasi mengakibatkan investor luar negeri berpindah ke negara-negara tetangga yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya merugikan perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi, menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak korupsi. Namun di sisi lain, upaya penindakan membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak

yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang kita ketahui upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (*preventif*).

Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal biasa. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula dalam memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Salah satu lembaga yang strategis untuk membentuk karakter bangsa yang anti korupsi adalah pendidikan.

Pendidikan diyakini sebagai kunci masa depan bangsa. Menurut Desiree<sup>1</sup> pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang harus ditanamkan sejak dini. Fokus awalnya siswa diperkenalkan konsep moral dan budaya lokal setempat. Kemudian mulai diperkenalkan kepada anak-anak norma-norma atau nilai-nilai sosial yang dianut di masyarakat. Pendidikan tersebut dalam bentuk pengenalan karakter, uraian berbagai perilaku dasar dengan memebrikan contoh tentang kegiatan apa yang tergolong pada pemahaman akan moral atau nilai tersebut. Selanjutnya, siswa diharapkan akan mampu menerapkan karakter moral tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari.

Berangkat dari optimisme bahwa penanaman nilai-nilai luhur dapat diperkenalkan sejak dini melalui pentisipan beberapa mata pelajaran tanpa membuat mata pelajaran khusus anti korupsi. Akhirnya, KPK dan bersama-sama dengan kalangan pendidikan dari berbagai sekolah di Jabodetabek dan Jawa Barat merumuskan suatu bentuk penyisipan sembilan (9) nilai-nilai luhur yang

---

<sup>1</sup>Desiree, *Buku Panduan Guru Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SD*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008), hal. ii

membentuk karakter anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, mandiri, sederhana, adil, dan peduli<sup>2</sup>.

Menyimak paparan di atas, penting merumuskan rencana pendidikan anti korupsi dalam tataran praktis di sekolah. Dalam makalah ini, disajikan salah satu upaya kreatif merancang pendidikan anti korupsi yaitu pendidikan anti korupsi berpendekatan klarifikasi nilai dalam perspektif teori Kohlberg. Dipilihnya pendekatan klarifikasi nilai dalam pendidikan anti korupsi untuk menanamkan sekaligus menguatkan karakter yang baik.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pendidikan Anti Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruption*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda)<sup>3</sup>.

Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran”. Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”<sup>4</sup>.

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan Muhammad Ali dalam Widi Nugrahaningsih, dkk. 1)Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya; 2)Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan 3)Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi<sup>5</sup>. Dengan demikian dapat diartikan kata korupsi sebagai sesuatu yang busuk, jahat

<sup>2</sup> R. Tamrin, *Buku Panduan Guru Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SLTA/MA*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008), hal. ii

<sup>3</sup>Tim Penulis, *Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), hal. 23

<sup>4</sup>Tim Penulis, *Pendidikan Anti*, hal 24

<sup>5</sup>.Widi Nugrahaningsih, SH., MH dan Indah Wahyu Utami, ST., M.Si, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015) hal. 190

dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat tidak bermoral, bersifat busuk, berkaitan dengan jabatan sebuah instansi, penyelewengan kekuasaan, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Selanjutnya menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara<sup>6</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah sebagaimana yang dikutip Hilyati Millabahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang<sup>7</sup>. Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa korupsi kalau sudah menjabat. Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin sebagaimana yang dikutip Isa Wahyudi, dkk. yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada<sup>8</sup>. Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain : (a) sifat

<sup>6</sup>Tim Penulis, *Pendidikan Anti*, hal. 24

<sup>7</sup>Hilyati Milla, *Pendidikan Kewirausahaan: Sebuah Alternatif Mengurangi Pengangguran Terdidik Dan Pencegahan Korupsi*, (Jurnal Al-Ta'lim, Jilid 1, Nomor 6 November 2013), hal. 468

<sup>8</sup><http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/277/290>, yang diakses pada hari Jumat 3 Maret 2017.

tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau (malas) bekerja keras<sup>9</sup>. Pendapat yang serupa juga dipaparkan Hardjapamekas (2008) sebagaimana yang dikuti Nilawati menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, rendahnya integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika<sup>10</sup>.

Dari beberapa uraian di atas, tindakan korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor- faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

## 2. Pendekatan Klarifikasi Nilai

Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*) pertama kali digunakan oleh Raths, Harmin dan Simon dengan bukunya berjudul “*Values and Teaching*” mereka menyatakan ada tiga proses dimana nilai-nilai dapat ditemukan yang melalui *choosing* (memilih), *prizing* (menilai) dan *acting* (aplikasi)<sup>11</sup>. Kemudian teori ini diperbahai lagi pada tahun 1975 menjadi *thinking* (berfikir), *feeling* (perasaan), *choosing* (memilih), *communicating* (komunikasi), *acting* (aplikasi)<sup>12</sup>.

Terdapat tujuh langkah yang menjadi prinsip klarifikasi nilai, yaitu: (1) nilai harus dipilih secara bebas, (2) nilai dipilih harus berbagai alternatif, (3) memilih nilai sesudah dipertimbangkan akibat-akibat dari pilihan, (4) nilai harus diwujudkan dihadapan umum, (5) nilai adalah kaidah hidup, (6) nilai harus selalu

<sup>9</sup>Mugi Hartana, Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, (*Panggung Hukum Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol 1 No. 2 Juni tahun 2015*), hal. 68

<sup>10</sup>Nilawati, Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang, (*Jurnal Intizar, Vol. 20, No. 2, 2014*)hal 392

<sup>11</sup>Jack R. Frankel, *How To Teach About Values : an Analytic Approach*, ( San Fransisco USA : Prentice Hall, 1977), hal. 32

<sup>12</sup>Barry Chazan, *Contemporary Approaches to Moral Education, The Hebrew University of Jerusalem*, ( New York & London : Teachers College Columbia University, 1985). 48

dipelihara, dan (7) berani mengemukakan nilai di depan orang lain. Ketujuh langkah klarifikasi ini mencerminkan keutuhan dimensi pendidikan yang produktif dan efisien. Langkah pertama sampai ketiga termasuk dimensi kognitif (menekankan kemampuan rasional). Keempat dan kelima mencerminkan dimensi afektif (penghargaan dan rasa bangga), langkah keenam dan ketujuh mencerminkan dimensi psikomotorik (tindakan konkrit yang terus menerus dan terpol).

Pendekatan klarifikasi nilai (*value clarification approach*) memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai karakteristik sebagai berikut.

1) Nilai tidak sama dengan kebutuhan

Nilai merupakan suatu pemahaman kompleks yang melibatkan pengamatan, persetujuan, pilihan dan pengaruh, kemudian dihubungkan antara satu sistem nilai dan suatu sistem kebutuhan atau tujuan yang kompleks. Keduanya perlu dijadikan pertimbangan untuk pemenuhan kebutuhan. Satu nilai melayani beberapa kebutuhan secara parsial atau resistensi terhadap yang lain.

2) Nilai tidak sama dengan tujuan

Nilai berisi kriteria untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai, implikasi nilai disesuaikan dengan keadaan siswa atau pembelajar.

3) Nilai tidak sama dengan keyakinan

Nilai melibatkan kepercayaan mengenai sesuatu yang dianut individu dan lingkungan dimana individu tersebut tinggal. Dalam hal ini nilai yang dianut individu termasuk di dalamnya adalah nilai masyarakat yang diadaptasi dengan nilai yang ada pada individu.

4) Nilai tidak sama dengan sikap

Sikap adalah satu pengaruh pengorganisasian dan penunjukan pada saat perilaku, tapi harga lebih dari sikap semata-mata, untuk kekurangan sikap terutama semata tuduhan dari diinginkan dan adalah khususnya yang dapat dijadikan acuan ke perorangan.

5) Nilai tidak sama dengan sekadar pilihan

Suatu nilai merupakan pilihan yang dipertimbangkan secara moral dengan penalaran atau pertimbangan estetika. Nilai tidak diperoleh secara serampangan

namun melalui proses pengalaman, peristiwa, dan pertimbangan internal individu. Setiap orang memiliki sejumlah nilai, baik yang jelas atau terselubung, disadari atau tidak. Klarifikasi nilai (*value clarification*) merupakan pendekatan mengajar dengan menggunakan pertanyaan atau proses menilai (*valuing process*) dan membantu siswa menguasai keterampilan menilai dalam bidang kehidupan yang kaya nilai.

Karakteristik model klarifikasi nilai secara instruksional adalah: (a) siswa terlibat secara aktif dalam mengembangkan pemahaman dan pengenalannya terhadap nilai-nilai pribadi, mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil, (b) mendorong siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai, dan (c) menggali dan mempertegas nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa. Sementara itu, tujuan dari penggunaan model klarifikasi nilai (*values clarification approach*) menurut Nurul Zuriah yaitu: pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain. Selain itu, pendekatan ini juga membantu peserta didik untuk mampu mengkomunikasikan secara jujur dan terbuka tentang nilai-nilai mereka sendiri kepada orang lain dan membantu peserta didik dalam menggunakan kemampuan berfikir rasional dan emosional dalam menilai perasaan, nilai dan tingkah laku mereka sendiri<sup>13</sup>

Asumsi dasar yang melatari dari aplikasi model klarifikasi nilai dalam konteks pembelajaran adalah: (a) masalah individu disebabkan oleh pikiran yang irasional terhadap nilai-nilai pribadinya, (b) nilai bersifat subjektif, ditentukan oleh seseorang berdasarkan kepada berbagai latar belakang pengalamannya sendiri, (c) klarifikasi nilai dalam proses konseling digunakan untuk memperoleh informasi tentang nilai yang dianut oleh siswa, sehingga konselor tahu apa yang menjadi dasar dari perilakunya dan bagaimana konselor memosisikan diri serta pemecahan yang sesuai dengan nilai yang dianut siswa, (d) peran guru adalah sebagai fasilitator yang bertugas merangsang dan

---

<sup>13</sup>Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*, ( Jakarta PT. Bumi Angkasa, 2007 ), h. 74-75

pendorong (motivator) bagi siswa, (e) tumpuan perhatian diberikan pada kehidupan, maksudnya adalah berusaha untuk mengarahkan tumpuan perhatian orang pada berbagai aspek kehidupan mereka sendiri, supaya mereka dapat mengidentifikasi hal-hal yang mereka nilai, (f) penerimaan sesuai dengan apa adanya, artinya ketika kita memberi perhatian pada klarifikasi nilai, kita perlu menerima posisi orang lain tanpa pertimbangan, sesuai dengan apa adanya, (g) lebih banyak merefleksi nilai daripada sekedar menerima, dan (h) siswa dituntut untuk berpikir dan berbuat lebih lanjut. Manfaat dari teknik klarifikasi nilai antara lain: (a) melatih peserta didik menggali dan menemukan nilai-nilai pribadinya, (b) melatih peserta didik terbebas dari pikiran yang irasional, (c) melatih peserta didik membuat keputusan sendiri, (d) melatih peserta didik menentukan baik buruk suatu hal bagi dirinya. Hal yang sangat diutamakan dalam teknik ini adalah mengembangkan keterampilan klarifikasi dalam melakukan proses penilaian terhadap sesuatu (objek, perilaku, atau peristiwa).

Ada tiga proses klarifikasi menurut pendekatan ini. Di dalam tiga proses tersebut terdapat tujuh sub proses sebagai berikut : *Pertama* : memilih: (1) dengan bebas, (2) dari bagian alternatif (3) Setelah mengadakan pertimbangan tentang berbagai akibatnya. *Kedua* : menghargai : (1) masa bahagia atau gembira dengan pilihannya, (2) mau mengakui pilihannya itu di depan umum, *Ketiga* : bertindak : (1) berbuat sesuatu sesuai dengan pilihannya, (2) diulang-ulang sebagai suatu pola tingkah laku dalam hidup<sup>14</sup>. Selanjutnya berikut dijabarkan tahapan-tahapan pembelajarannya:

#### 1. Pengenalan dan Pemahaman (Identifikasi dan Eksplorasi)

Melakukan eksplorasi terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat daftar (*list*) nilai apa saja yang dianutnya. Kemudian guru menanyakan sejauh mana nilai-nilai itu mempengaruhi tingkah laku siswa dalam kehidupannya sehari-hari.

#### 2. Memilih (*choosing*)

##### a. Dengan bebas

---

<sup>14</sup>[www. Depdiknas. goid/jurnal/26/pendekatan Pendidikan](http://www.Depdiknas.go.id/jurnal/26/pendekatan Pendidikan). Teuku \_Ramli. Pendekatan-Pendekatan Pendidikan Nilai Dan Implementasi Dalam Pendidikan Budi Pekerti

Siswa mengeksplorasi keluasan sistem nilai yang dimilikinya, menilik diri dalam menentukan mana sistem nilai keyakinannya yang menguntungkan dan mana yang merugikan dirinya baik secara pribadi, sosial, maupun religius.

b. Dari berbagai alternatif

Siswa juga mencari dan menemukan sumber-sumber informasi nilai yang umum diyakini orang, khususnya orang-orang berarti, dan mendiskusikannya bersama guru.

c. Setelah mengadakan pertimbangan tentang berbagai akibatnya, siswa (baik secara individu maupun kelompok) berupaya mendiskusikannya secara internal (membatin), melakukan pertimbangan nilai, bahkan perdebatan internal (*disputing*) mengenai keuntungan dan kelemahan sistem nilai tertentu.

3. Menghargai (*prizing*)

a. Guru mengkondisikan siswa agar mereka merasakan atau meyakini atas rasa bahagia atau gembira dengan pilihannya (nilai yang dianut dari masalah yang dipilih secara klasikal).

b. Guru memfasilitasi siswa untuk mau dan mampu menyajikan pilihannya didepan kelas atau dalam diskusi kelompok (*rewarding*).

4. Bertindak (*acting*)

a. Berbuat sesuatu dengan pilihannya

b. Siswa membuat keyakinan nilai secara tegas dan mencoba berbuat serta berinteraksi menurut sistem nilai pilihannya yang telah ditetapkan secara berkelompok ataupun personal.

c. Pilihan nilai (kesimpulan atas masalah) bisa dilakukan pengulangan dengan penekanan beberapa konsep oleh guru untuk melihat dan memunculkan suatu pola tingkah laku dalam hidup di masyarakat (harapan pola kehidupan yang diidamkan).

5. Refleksi dan Evaluasi

a. Membuat refleksi diri terhadap pilihan nilainya, pengalaman yang dirasakan, apakah siswa merasa nyaman dengan pilihan nilainya (pada

konteks ini, guru bertindak sebagai fasilitator dan mediator yang kreatif/menyediakan informasi/data).

- b. Guru bersama siswa melaksanakan evaluasi apakah siswa sudah merasa puas dengan pilihannya, hal-hal apa yang dirasa belum pas, apakah diperlukan revisi terhadap pilihan nilainya. Untuk melakukan evaluasi dapat menggunakan pertanyaan 5W+1H
- c. Guru melakukan penilaian akhir dengan meminta siswa untuk melakukannya secara personal ataupun kelompok, sehingga siswa merasakan adanya penghargaan atas nilai yang dianutnya.

### 3. Perkembangan Moral Anak SD

Secara etimologis, moral berasal dari kata "mos" atau "mores" yang berarti kesusilaan, tata cara, atau adat istiadat. Pengertian tersebut dalam perjalanan mengalami perkembangan dan makna, meski belum ada persetujuan terhadap delimitasi yang tepat tentang isu moral. Menurut Winkler dalam<sup>15</sup> Susilawati perkembangan pengertian moral adalah sebagai berikut: 1) moral adalah seluruh kaidah kesusilaan atau kebiasaan yang berlaku pada suatu kelompok tertentu, 2) moralisme, yaitu suatu paham yang diikuti oleh seseorang yang melihat segala sesuatu dari sudut moral dan sangat konsen pada aspek moral dan ajaran moral sebagai sesuatu yang luhur, 3) moralitas adalah konsep pola kaidah tingkah laku, budi pekerti yang dipandang baik dan luhur dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang meliputi: asas atau sifat moral, kebajikan dan ajaran tentang moral serta keadaan yang sesuai dengan nilai dan akhlak yang baik, 4) aturan moral, yaitu aturan yang merefleksikan tradisi kultur yang diikuti orang dari kebiasaan sebagai landasan tumbuhnya aturan universal.

Pengertian lain disampaikan Poerwadarmintasebagaimana yang dikutip Ahmad Mansur Noor<sup>16</sup> moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, serta sesuatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan antara

<sup>15</sup> Samsul Susilawati, Mengubah Metode Pendidikan Moral Kohlberg Dalam Pembelajaran (*Jurnal el Hikmah, Fakultas Tarbiyah, UIN Malang*) hal. 246

<sup>16</sup> Ahmad Mansur Noor, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Jakarta : Dirjen Bindaga Islam DEPAG RI, 1985) hal. 7

perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral juga mendasari dan mengendalikan seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku.

Uraian deskripsi tentang moral seperti yang telah diuraikan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa moral pada dasarnya membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang baik dan tidak baik. Bila dicermati, ada tiga bagian dalam tataran moral, yaitu: 1) moral sebagai ajaran, 2) sebagai nilai dan 3) sebagai aturan, norma. Dengan demikian, moral berada dan berasal dari luar diri manusia, namun mempunyai kekuatan untuk ditaati dan dipatuhi. Kekuatannya bersifat mengikat, membatasi, mengarahkan dan menentukan. Moral dikatakan mengikat, sebab mengikat seseorang atau kelompok dengan alasan dianut, diyakini dan dilaksanakan, dan menjadi cita-cita yang ada pada seseorang atau kelompok itu<sup>17</sup>.

Melalui studi yang mendalam, Lawrence Kohlberg telah mempelajari perkembangan moral pada anak-anak dan salah satu penemuan yang terpenting adalah perkembangan moral melalui tahap-tahap tertentu. Kohlberg mengemukakan ada 6 tahap perkembangan moral, mulai tahap pertama yang terendah dan lambat laun berkembang ke tahap yang lebih tinggi hingga mencapai tahap yang tertinggi, yaitu tahap keenam. Perkembangan moral melalui tahap-tahap itu, menurut Kohlberg berlaku secara universal bagi semua kebudayaan.

Dengan teori Kohlberg yang berlaku secara universal bagi semua kebudayaan tersebut membuka jalan untuk menciptakan metode baru dalam pendidikan moral. Metode ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) berpedoman pada tahap-tahap perkembangan moral. Nilai-nilai diperoleh melalui suatu proses yang harus mempertimbangkan tingkatan dalam taraf pemahaman moral anak, 2) bersifat anti dogmatis, menjauhi indoktrinasi. Hal ini berarti bahwa anak-anak diberitahukan nilai apa yang harus mereka anut. Mereka diberi kesempatan untuk membicarakan secara kritis berbagai masalah moral. Mereka harus membentuk pikirannya sendiri tentang masalah-masalah itu dan membandingkan dengan pendapat teman-temannya atau orang lain.

---

<sup>17</sup>Febrianty. "Perkembangan Model Moral Kognitif dan Relevansinya Dalam Riset-Riset Akuntansi". (*Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 2011), hlm. 57-77

Keseluruhan tingkatan dan tahapan-tahapan perkembangan moral kognitif Kohlberg<sup>18</sup> adalah sebagai berikut:

### 1. Pra Konvensional

Pada tingkatan ini, anak merespon aturan tradisi, label baik-buruk; benar salah, dengan menginterpretasi label dalam pemahaman hedonistik dan konsekuensi dari tindakan. Tingkatan ini juga menunjukkan bahwa individu menghadapi masalah moral dari segi kepentingan diri sendiri. Seseorang tidak menghiraukan apa yang dirumuskan masyarakat, akan tetapi mementingkan konsekuensi-konsekuensi dari perbuatannya (hukuman, pujian, penghargaan). Anak cenderung menghindari; perbuatan yang menimbulkan resiko. Tingkatan ini dibagi menjadi dua tahap. *Tahap 1: Orientasi pada hukuman dan Kepatuhan.* Jadi, alasan anak pada tahap ini bersifat fisik. Apa yang benar adalah bagaimana menghindari hukuman, bukan karena rasa hormat atas nilai-nilai moral yang mendasarinya. *Tahap 2: Orientasi pada instrumental.* Tindakan yang benar adalah sudah sesuai atau memenuhi kebutuhan seseorang berdasarkan persetujuan. Pada tahap ini adil dipandang sebagai sesuatu yang bersifat balas budi, saling memberi. Sesuatu dianggap baik apabila berguna untuk membawa kebaikan bagi dirinya sebagai balasannya. Anak membagi kue kepada temannya, agar pada waktunya teman itu juga akan membalasnya dengan cara yang sama. Motifnya adalah membantu orang lain agar kelak ia juga akan membantu dirinya (balas budi).

### 2. Konvensional

Pada tingkatan ini anak mendekati permasalahan dari segi hubungan individu masyarakat. Seseorang menyadari bahwa masyarakat mengharapkan agar ia berbuat sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Perhatian kepada nilai keluarga, kelompok atau bangsa diterima sebagai nilai dalam dirinya. Terdapat konformitas interpersonal. Pada tingkatan ini, yang menjadi pedoman kelakuan adalah apa yang diharapkan dari kita oleh orangtua, keluarga, guru, masyarakat atau negara. Individu pada tingkatan ini berusaha berkelakuan sesuai dengan kelakuan orang lain dalam kelompok, sehingga terdapat konformitas kelakuan. Tingkatan ini dibagi dalam dua tahap, yaitu: *Tahap 3: Orientasi "good boy-nice*

<sup>18</sup>Cahyono, C.H & Suparyo, W. *Tahap-Tahap Perkembangan Moral.* (Malang: IKIP Malang, 1985), hal. 37-45

*girl*". Persetujuan antar personal. Menjadi orang yang diharapkan, dan tingkah laku yang baik, atau menolong orang lain adalah menyenangkan. Pertimbangannya adalah "perhatian" (ia berbuat baik).

Motivasi perbuatan moral pada tingkatan ini ialah keinginan memenuhi apa yang diharapkan orang yang dihargai. Pada diri anak telah timbul kesadaran bahwa orang lain mengharapkan kelakuan tertentu daripadanya. Tahap 4: *Orientasi kesadaran sosial*. Perilaku yang benar adalah memenuhi kewajiban (kesadaran imperatif). Pada tahapan ini, anak tidak lagi bertindak berdasarkan harapan orang yang dihormati, namun apa yang diharapkan oleh masyarakat umum. Dalam tahap ini, hukum tampil sebagai nilai yang utama, yang dapat mengatur kehidupan masyarakat. Kelakuan baik diukur dengan kepatuhannya akan aturan-aturan yang telah ditetapkan, otoritas demi ketertiban masyarakat.

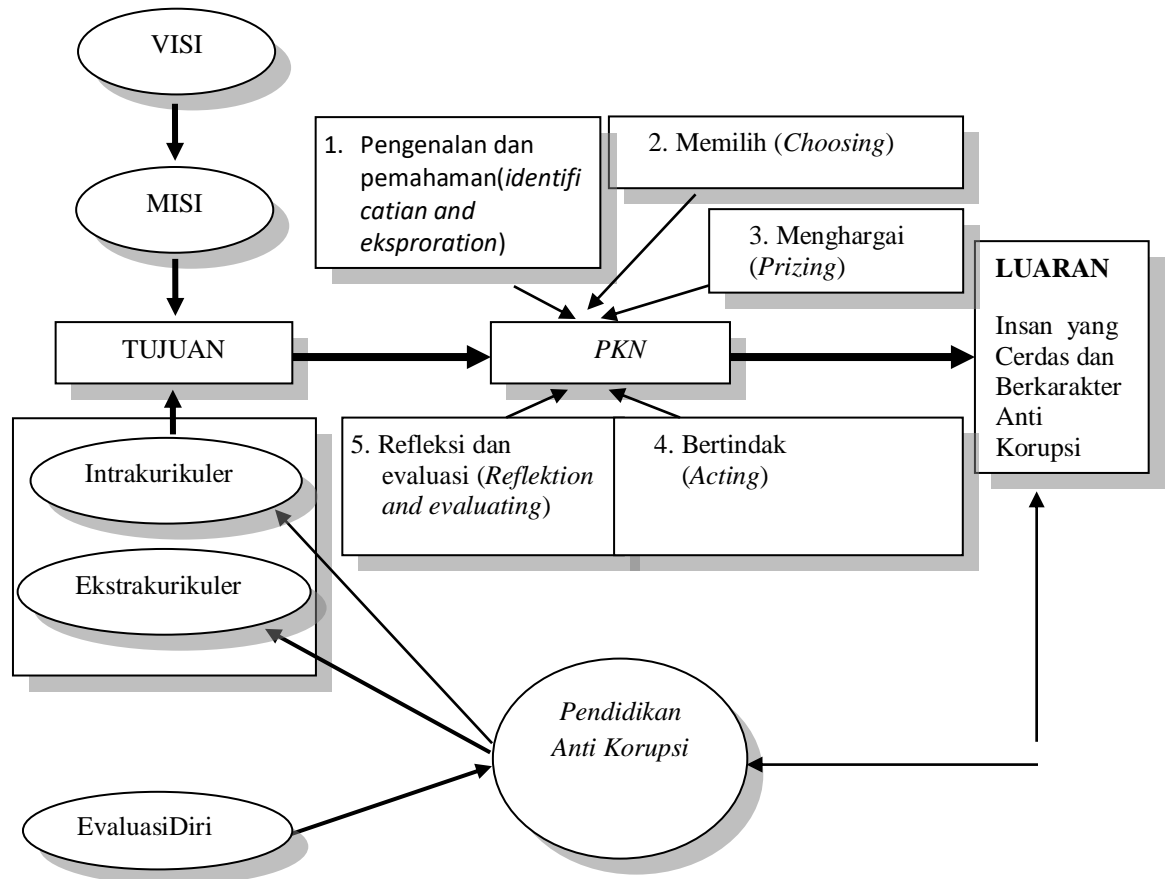
### 3. Post-Konvensional

Pada tingkatan ini, ada usaha yang jelas untuk memiliki moral dan prinsip. Tingkatan ini juga disebut tingkatan otonomi. Seseorang yang berada pada tingkatan ini memandang prinsip sebagai identifikasi dirinya, lepas dari otoritas individu atau kelompok, tingkat post-konvensional terdiri atas 2 tahap. Tahap 5: *Orientasi kontrak sosial dan hak-hak individu*. Tindakan yang benar ditentukan dalam istilah kebenaran individu secara umum dan standar yang sudah diuji secara kritis dan disetujui oleh seluruh masyarakat. Suatu perasaan kesetiaan kepada hukum demi kesejahteraan semua orang dan hak-haknya. Komitmen sosial dan legal dipandang sebagai hasil persetujuan bersarna dan harus dipatuhi oleh yang bersangkutan. Tahap 6: *Orientasi prinsip etis universal*. Kebenaran ditentukan oleh prinsip etis di dalam dirinya berdasar pada pemahaman logika universal (keadilan, kesamaan hak, dan kepatutan sebagai makhluk individu). Seseorang bertindak menurut prinsip universal. Seseorang wajib menyelamatkan jiwa orang lain. Dari setiap tahap perkembangan dalam skema Kohlberg tersebut mengandung unsur logika atau penalaran masing-masing. Proses pemikiran atau penalaran moral dalam model Moral Reasoning memiliki karakteristik dilihat dari sisi interaktifnya, mengandung makna adanya aplikasi proses logika dari seseorang dalam menyikapi masalah moral, pengalaman dan situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap ini memandang kelakuan, baik dari segi hak maupun norma umum yang berlaku bagi individu yang telah diselidiki secara kritis dan diterima baik oleh seluruh masyarakat. Kewajiban moral dipandang sebagai kontrak sosial. Prosedur yang esensi dalam *Moral Reasoning* terkait dengan konsep keadilan. Artinya, untuk dapat berpikir secara moral setidaknya seseorang harus mampu mempertimbangkan pilihan potensialnya yang berdampak akan meningkatkan perhatiannya dalam memecahkan masalah moral terhadap orang lain tanpa dipengaruhi oleh prasangka atau tekanan pihak lain. Melalui diskusi terbuka kesempatan untuk berpikir tentang masalah moral. Walaupun pendapat sama, mungkin alasannya berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan tahap perkembangan yang bersangkutan. Model Kohlberg ini menggunakan “dilema moral” dan pertanyaan moral sebagai strategi utama agar anak didik meningkat dalam hirarki moralnya.

#### **4. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Berpendekatan Klarifikasi Nilai di Sekolah Dasar**

Pendidikan anti korupsi sebagaimana telah diuraikan di atas harus dioperasionalkan sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan di sekolah-sekolah. Salah satu pendekatan dalam pendidikan nilai yang mudah diimplimentasikan adalah pendekatan klarifikasi nilai (PKN). Pendekatan klarifikasi nilai sejalan dengan teori Kohlberg yang menyatakan bahwa penanaman moral penting disesuaikan dengan usia anak. Secara skematik, pola penerapan pendidikan anti korupsi melalui PKN dalam perspektif teori Kohlberg dapat disajikan seperti Gambar 1.

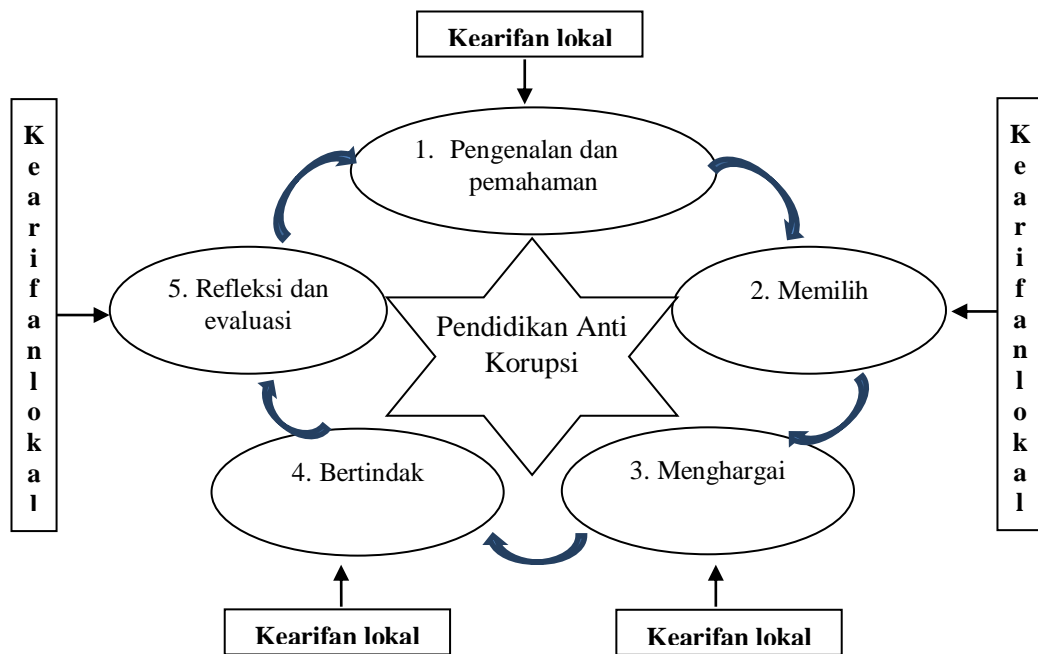


Gambar 1. Skematik Pola Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Melalui PKN dalam Perspektif Teori Kohlberg

Berdasarkan Gambar 1 di atas, tampak bahwa penerapan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui perumusan visi dan misi serta tujuan sekolah. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal dapat dikemas dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler. Di dalam pelaksanaannya penting dilakukan evaluasi diri untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah.

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anti korupsi melalui kurikuler dapat dimplementasikan melalui pendekatan klarifikasi nilai(PKN), yang terdiri lima tahapan, yaitu pengenalan dan pemahaman (*identifikation and eksplorasion*), memilih(*choosing*), menghargai(*prizing*), bertindak (*acting*) dan refleksi dan

evaluasi(*reflektion and evaluating*). Secara lebih operasional, penerapan pendidikan anti korupsi PKN berbasis kearifan lokal dalam konteks pembelajaran di kelas, dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema penerapan pendidikan anti korupsi melalui PKN Berbasis Kearifan Lokal di Kelas

Berdasarkan Gambar 2 di atas, langkah-langkah pembelajaran pendidikan anti korupsi melalui PKN berbasis kearifan lokal dapat dimulai dari pengenalan dan pemahaman, dilanjutkan dengan memilih, menghargai, bertindak, dan refleksi-evaluasi. Pada setiap tahapan tersebut disisipkan nilai-nilai kearifan lokal.

Kegiatan pembelajaran tersebut dapat diuraikan menurut skenario pembelajaran seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Langkah-Langkah Pembelajaran pendidikan anti korupsi melalui PKN berbasis kearifan lokal

Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
<p><i>Pengenalan dan Pemahaman</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menanyakan sejauh mana nilai-nilai itu mempengaruhi tingkah laku siswa dalam kehidupannya sehari-hari</li> </ul> <p><i>Memilih</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi siswa untuk menentukan keluasan sistem yang</li> </ul>	<p><i>Pengenalan dan Pemahaman</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan eksplorasi terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa dengan cara membuat daftar (<i>list</i>) nilai yang dianut siswa.</li> </ul> <p><i>Memilih</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa menentukan keluasan sistem nilai yang dimilikinya, menilik diri</li> </ul>

<p>dianut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi siswa mencari dan menemukan sumber-sumber informasi nilai yang umum diyakini orang, khususnya orang-orang berarti</li> <li>- Memfasilitasi siswa (baik secara individu maupun kelompok) untuk mendiskusikannya secara internal (membatin), melakukan pertimbangan nilai, bahkan perdebatan internal (<i>disputing</i>) mengenai keuntungan dan kelemahan sistem nilai tertentu</li> </ul> <p><i>Menghargai</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru mengkondisikan siswa agar mereka meyakini dengan rasa bahagia pilihan nilai yang dianut.</li> <li>- Guru memfasilitasi siswa untuk mau dan mampu menyajikan pilihan nilainya di depan kelas atau diskusi di dalam</li> </ul> <p><i>Bertindak</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru meyakinkan bahwa pilihan nilai bisa dilakukan pengulangan dengan menekankan beberapa konsep</li> </ul> <p>Refleksi dan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersama siswa melakukan evaluasi terhadap sistem nilai yang</li> <li>- Bersama siswa menyimpulkan terhadap hasil diskusinya</li> <li>- Melaksanakan tes formatif berdasarkan tugas yang diberikan sebelumnya</li> <li>- Tindak lanjut dengan memberikan tugas</li> </ul>	<p>dalam menentukan mana sistem nilai keyakinannya yang menguntungkan dan mana yang merugikan dirinya baik secara pribadi, sosial, maupun religius.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari dan menemukan sumber-sumber informasi nilai yang umum diyakini orang, khususnya orang-orang berarti, dan mendiskusikannya bersama guru</li> <li>- Setelah mengadakan pertimbangan tentang berbagai akibatnya, siswa (baik secara individu maupun kelompok) berupaya mendiskusikannya secara internal (membatin), melakukan pertimbangan nilai, bahkan perdebatan internal (<i>disputing</i>) mengenai keuntungan dan kelemahan sistem nilai tertentu.</li> </ul> <p><i>Menghargai</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdiskusi berbagai alternatif nilai yang diyakini masyarakat.</li> <li>- Mempertimbangkan akibat dari sebuah pilihan nilai yang dianut.</li> <li>- kelompoknya.</li> </ul> <p><i>Bertindak</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siswa membuat keyakinan secara tegas dan mencoba berbuat serta berinteraksi menurut sistem nilai pilihannya.</li> </ul> <p>Refleksi dan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat refleksi diri terhadap pilihan nilainya</li> <li>- Bersama guru melakukan evaluasi terhadap sistem nilai yang</li> <li>- Bersama guru menyimpulkan terhadap hasil diskusinya</li> <li>- Mengerjakan tes formatif</li> </ul>
---	--

### C. PENUTUP

Pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang ditanamkan sejak dini. Pendidikan anti korupsi dimaksudkan untuk membentuk karakter bangsa yang anti korupsi. Tindakan korupsi pada dasarnya bukanlah

peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor- faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Lembaga yang sangat strategis untuk menanamkan pendidikan anti korupsi adalah sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan tempat anak berinteraksi secara formal, misalnya melalui pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran memerlukan suatu pendekatan yang efektif. Salah satu pendekatan yang efektif dalam menanamkan pendidikan anti korupsi adalah pendekatan klarifikasi nilai. Pendekatan klarifikasi nilai memberi penekanan pada usaha membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatan sendiri, untuk meningkatkan kepada mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri.

Dalam tataran praktis penanganan pendidikan anti korupsi harus mengacu pada teori moral karena masalah korupsi bagian dari masalah moral. Salah satu teori moral yang cukup berhasil adalah teori moral Kohlberg. Keseluruhan tingkatan dan tahapan-tahapan perkembangan moral kognitif Kohlberg adalah sebagai berikut: 1. Pra Konvensional, tingkatan ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu *tahap 1): Orientasi pada hukuman dan Kepatuhan* dan *tahap 2): Orientasi pada instrumental*. 2. Konvensional, tingkatan ini dibagi dalam dua tahap, yaitu: *tahap 3): Orientasi "good boy-nice girl"* dan *tahap 4): Orientasi kesadaran sosial*. 3. Post-Konvensional, tingkat post-konvensional terdiri atas 2 tahap. *Tahap 5): Orientasi kontrak sosial* dan *tahap 6): Orientasi prinsip ethis universal*.

Berdasarkan teori Kohlberg tersebut pendidikan moral harus disesuaikan dengan perkembangan moral anak. Dengan demikian pendidikan moral menjadi lebih efektif. Pendekatan klarifikasi nilai berbasis kerajinan local merupakan salah satu pendekatan yang sejalan dengan teori moral Kohlberg.

## DAFTAR PUSTAKA

- C.H, Cahyono, & W., Suparyo, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*. Malang: IKIP Malang, 1985
- Chazan, Barry. *Contemporary Approaches to Moral Education, The Hebrew University of Jerusalem*, New York & London : Teachers College Columbia University, 1985
- Desiree, *Buku Panduan Guru Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SD*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008
- Febrianty. “Perkembangan Model Moral Kognitif dan Relevansinya Dalam Riset-Riset Akuntansi”. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 2011
- Hartana, Mugi. Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, *Panggung Hukum Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol 1 No. 2 Juni, 2015*
- Jack R. Frankel, *How To Teach About Values : an Analytic Approach*, San Fransisco USA : Prentice Hall, 1977
- Milla , Hilyati. *Pendidikan Kewirausahaan: Sebuah Alternatif Mengurangi Pengangguran Terdidik Dan Pencegahan Korupsi*, Jurnal Al-Ta’lim, Jilid 1, Nomor 6 November 2013
- Nilawati, Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang, *Jurnal Intizar, Vol. 20, No. 2, 2014*
- Noor, Ahmad Mansur. *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Jakarta : Dirjen Bindaga Islam DEPAG RI, 1985
- Nugrahaningsih, Widi. SH., MH dan Wahyu Utami, Indah. ST., M.Si, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Bagi Anti Korupsi Dan Menjunjung Hak Asasi Manusia*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015
- Susilawati, Samsul. Mengubah Metode Pendidikan Moral Kohlberg Dalam Pembelajaran *Jurnal el Hikmah, Fakultas Tarbiyah, UIN Malang*
- Tamrin, R. *Buku Panduan Guru Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SLTA/MA*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008
- Tim Penulis, *Pendidikan Anti Korupsi Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud, 2011
- Zuriah, Nurul. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta PT. Bumi Angkasa, 2007

<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/277/290>, yang diakses pada hari Jumat 3 Maret 2017.

[http://www. Depdiknas. goid/jurnal/26/pendekatan Pendidikan](http://www.Depdiknas.go.id/jurnal/26/pendekatan Pendidikan). Teuku \_Ramli.  
Pendekatan-Pendekatan Pendidikan Nilai Dan Implementasi Dalam Pendidikan Budi Pekerti